

## BAB VI

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- As'Adi, Edi, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Habermas, Jurgen, 1989, *Toward A Rational Society: Student Protest, Science, And Politics*, Beacon Press, London
- Hariwijaya, H. dan M. Djaelani, 2004, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*. Zenith Publisher, Yogyakarta
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum (Cetakan Pertama)*, CV. Ganda, Jakarta
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik : Perubahan dan Kesenambungan*, LP3ES, Jakarta
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Luthans, Fred, 2006, *Perilaku Organisasi*, Cetakan ke-10, Andi, Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakty, Bandung
- Murad, Rusmadi, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sardjita, 2011, *Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan untuk Keamanan di Bidang Investasi*, Mitra Amanah

Publishing bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Informasi Nasional (PUSPIN) Jakarta, Yogyakarta

Selindeho, John, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua*, Grafika, Jakarta

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta

Suparman, Eman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta

Thalib, H. Hambali, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Ury, W.L., *et. al*, 2007, *Getting Disputes Resolves*, dalam Adisulistiono, *Mengembangkan PARADIGMA Non-litigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta

Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Empat, Jakarta

## **B. Jurnal, Tesis, Skripsi, Makalah, Artikel Internet**

Barometer Medan, *PLN Tak Miliki Izin Pembangunan Tower SUTET dari BPPMT Samosir*, <http://www.barometermedan.net/pln-tak-miliki-izin-pembangunan-tower-sutet-bppmt-samosir/>, pada tanggal 10 Mei 2019

Diasari, Ratih, 2015 “Faktor Terjadinya Konflik Pertanahan Dan Potensi Cara Penyelesaian, Studi : Konflik Pertanahan di RW.07, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunyingkaler, Kota Bandung”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Ismawati, Linda, 2015 “*Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ring Road Utara Wonosari Di Desa Grogol Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul*”, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Harahap Kanna, 2005 “*Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak atas Tanah antara Masyarakat dengan PT. Poleka Jaya Agung di Dusun Kassa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*”, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Hukum Online, *Bahasa Hukum : Jaksa Pengacara Negara*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara/>, diakses tanggal 25 Februari 2020

Listrik Indonesia, GI Jaringan Transmisi 150 kV Perkuat Sistem Kelistrikan Sumatera, diakses melalui <http://www.listrikindonesia.com/gi-jaringan-transmisi-150-kv-perkuat-sistem-kelistrikan-sumatera-2931.htm>, pada tanggal 9 Januari 2020

Mulyana, Ridwan Nanda, 2019, *PLN Targetkan Tol Listrik Sumatera 275 kv Tahap I Rampung Semester I-2019*, <https://industri.kontan.co.id/news/pln-targetkan-tol-listrik-sumatera-275-kv-tahap-i-rampung-semester-i-2019>, diakses tanggal 10 Mei 2019

Santoso, Urip, 2016, “*Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, diakses pada <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/588> tanggal 16 Januari 2020

Setiawan, Heru, 2014 “*Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dengan Cara Mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*”, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34)

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951)

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu

#### **D. Dokumen Lainnya**

- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0289.K/DIR/2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah dan Biaya Operasional Kompensasi di Lingkungan PT PLN (Persero)
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0109.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara
- Surat Direktur Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan PT PLN (Persero) Nomor 2392 / 101 / DIR / 2014 tentang Tanggapan Pengenaan Retribusi IMB atas Tower Transmisi tanggal 16 September 2014
- Surat dari Pemilik Tanah atas nama Jusman Nainggolan kepada PLN UIP Sumbagut tanggal 2 November 2016 perihal keberatan atas pembangunan lintasan jaringan transmisi PLN
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 570/3922/BPMPT/XII/2016 perihal Izin Mendirikan Bangunan IMB tanggal 6 Desember 2016
- Surat DPRD Kabupaten Samosir Nomor : 170/05/DPRD-SMR/I/2017 perihal Permohonan Konsultasi Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab.Samosir tanggal 10 Januari 2017 kepada PT PLN UIP Sumbagut
- Surat DPRD Kabupaten Samosir Nomor 70/19/DPRD-SMR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pemberhentian Segala Kegiatan Pembangunan SUTT di Kabupaten Samosir
- Surat PLN UIP Sumbagut Nomor 0076/KON.02.02/UIP II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Tanggapan Atas Pemberhentian Kegiatan Pembangunan SUTT di Kabupaten Samosir
- Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara Nomor 0604.K/GM UIP SUMBAGUT/2019 tentang Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara
- Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI pada tanggal 19 September 1992 perihal Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor LB.01.03/4/557/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Informasi Dampak SUTT/SUTET Terhadap Kesehatan